

Hal-Hal Yang Diatur Dalam UUD 1945
Yang Terkait Dengan UU-Pemda and UU-PKPD

Founding Law & Regional Government (Supriadi)

Project 497-0357 / 104-000
Strategic Objective 1
ECG, USAID/Indonesia
Contract No. 497-C-00-98-00045-00

Center for Institutional Reform and the Informal Sector (IRIS)
University of Maryland at College Park

March 2000

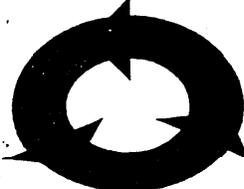
Novel, 11, 2012

Law No. 22 / 99

Regional Government

Reddy Supriadi, Hand Out

1945 - IPEM ATU



HAL-HAL YANG DIATUR DALAM UUD 1945 YANG TERKAIT DENGAN UU-PEMDA & UU-PKPD

4

Pasal 1

- Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik.
- Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR.

Pasal 18

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan UU dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Pasal 33

- Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
- Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan utk. sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



FUNGSI PEMERINTAH

- **Fungsi Stabilisasi**, lebih efektif oleh Pusat.
- **Fungsi Distribusi**, lebih efektif oleh Pusat.
- **Fungsi Alokasi**, lebih efektif oleh Daerah, walaupun Pusat dapat melaksanakan fungsi ini, khususnya bagi pelayanan publik lintas wilayah Daerah (*eksternalitas*)

Catatan :

Berdasarkan fungsi Pemerintah seperti di atas, maka UU Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah memperhatikan pula aspek perimbangan keuangan antar Daerah, selain perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah.



GOOD GOVERNANCE

- **Transparancy**
- **Participation**
- **Accountability**
- **Efficiency**
- **Human Right**



Daftar Isi UU Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

- Bab I : Ketentuan Umum (Pasal 1)**
- Bab II : Dasar-Dasar Pembiayaan Pemerintah Daerah (Pasal 2)**
- Bab III : Sumber-Sumber Penerimaan Pelaksanaan Desentralisasi**
- 1. Sumber-Sumber Penerimaan Daerah (Pasal 3)**
 - 2. Sumber Pendapatan Asli Daerah (Pasal 4-5)**
 - 3. Dana Perimbangan (Pasal 6-10)**
 - 4. Pinjaman Daerah (Pasal 11-15)**
 - 5. Dana Darurat (Pasal 16)**
- Bab IV : Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi (Pasal 17)**
- Bab V : Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan (Pasal 18)**
- Bab VI : Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Desentralisasi**
- 1. Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan dalam Pelaksanaan Desentralisasi (Pasal 19-23)**
 - 2. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Pasal 24)**
 - 3. Pemeriksaan Keuangan Daerah (Pasal 25-26)**
- Bab VII : Sistem Informasi Keuangan Daerah (Pasal 27-28)**
- Bab VIII : Sekretariat Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Pasal 29)**
- Bab IX : Ketentuan Peralihan (Pasal 30-31)**
- Bab X : Ketentuan Penutup (Pasal 32-33)**



*PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA
PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH*

(Pasal 1 angka 1)

adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antar-Daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan Daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.